



**JAWABAN PEMERINTAH
ATAS PANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI
DPRD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

TERHADAP

**LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2018**

Samarinda, 19 Juni 2019

***Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua***

**Yth. Saudara Ketua, Wakil Ketua, dan para Anggota DPRD
Provinsi Kalimantan Timur,**

**Yth. Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi
Kalimantan Timur, Para Pejabat di lingkungan Pemerintah
Provinsi Kalimantan Timur,**

**Yth. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta, Tokoh
Masyarakat, Tokoh Agama dan Tokoh Pemuda serta rekan-
rekan Pers.**

Hadirin dan Undangan yang Berbahagia,

Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita kembali dipertemukan pada Rapat Paripurna Dewan, dalam rangka Penyampaian Jawaban, Tanggapan, dan Penjelasan Pemerintah atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2018.

Sebelum menyampaikan jawaban dan penjelasan terhadap Pandangan umum Fraksi-Fraksi, Pemerintah menyampaikan apresiasi kepada seluruh relawan yang telah banyak membantu para korban banjir di beberapa daerah di Provinsi Kalimantan Timur yang mengalami musibah banjir. Kami juga menyampaikan simpati dan empati yang mendalam kepada puluhan ribu warga yang terkena dampak banjir, Pemerintah menyadari permasalahan ini harus segera diatasi dan mengambil langkah-langkah strategis untuk mengatasi permasalahan ini yang nantinya akan disampaikan sesuai dengan tanggapan Fraksi Dewan yang Terhormat.

Pemerintah mengucapkan terima kasih dan menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya, atas aspirasi yang disampaikan Fraksi-Fraksi Dewan yang terhormat terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2018, yang disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD pada tanggal 17 Juni 2019 yang lalu.

Saudara Ketua dan anggota Dewan yang terhormat, hadirin yang berbahagia,

Perkenankan saya menyampaikan jawaban dan penjelasan Pemerintah terhadap beberapa hal yang disampaikan oleh Fraksi-Fraksi Dewan, melalui Pandangan Umum terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2018, sebagai berikut :

Jawaban dan Penjelasan atas Pandangan Umum Fraksi Partai Keadilan Sejahtera

Pemerintah mengucapkan terima kasih atas apresiasi Fraksi Dewan Yang Terhormat atas capaian hasil pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2018 yang mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), hal ini tidak lepas dari dukungan yang telah diberikan oleh Fraksi Dewan yang Terhormat.

Berkenaan dengan pernyataan sikap Fraksi Dewan yang Terhormat, disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

Berkenaan dengan bencana banjir yang melanda di beberapa Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur saat ini, Pemerintah juga menaruh keprihatinan yang mendalam dan telah melakukan upaya untuk menghimpun serta menyalurkan bantuan berupa kebutuhan pokok, pakaian, obat-obatan dan kebutuhan lainnya yang berasal dari sumbangan para donatur melalui SKPD terkait.

Pemerintah berterima kasih dan sependapat atas saran dan masukan Fraksi Dewan yang Terhormat berkenaan upaya penanganan banjir khususnya di Kota Samarinda. Penanganan banjir di Kota Samarinda pada subsistem DAS karang mumus harus dilaksanakan secara menyeluruh mulai dari wilayah hulu – tengah – hilir. Pada wilayah hulu perlu dilakukan konservasi pada kawasan yang telah mengalami pengupasan lahan, revitalisasi rawa dan cekungan serta pengendalian izin tambang.

Pada wilayah tengah melakukan revitalisasi waduk benanga, pengendalian pembangunan permukiman dan pembukaan tutupan lahan. Sedangkan pada hilir dilakukan normalisasi dan perkuatan tebing sungai karang mumus. Untuk itu penanganannya perlu dilakukan secara komprehensif, lintas sektor, lintas wilayah, lintas pemerintah, melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan seluruh masyarakat.

Pada Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019–2023, pengendalian banjir khususnya di kawasan perkotaan menjadi program prioritas pembangunan. Selain itu dalam upaya mensinergikan program

dan pendanaan pengendalian banjir, saat ini dalam proses finalisasi nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama (PKS) antara kementerian PUPR, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Kota Samarinda, Balikpapan, dan Bontang.

Untuk penanganan jangka pendek pengendalian banjir Kota Samarinda, dalam waktu dekat akan dilakukan normalisasi pada lokasi pendangkalan dan penyempitan alur sungai karang mumus seperti di lokasi jembatan nibung – pasar segiri – jembatan perniagaan. Kunci utama pelaksanaan program pengendalian banjir adalah penanganan permasalahan sosial dan lahan terutama pemindahan penduduk yang bermukim di bantaran dan badan sungai yang menjadi tanggung jawab Pemerintah kota Samarinda. Untuk itu pemerintah kota Samarinda termasuk pula Balikpapan dan Bontang harus berani mengambil kebijakan dan langkah progresif dan tidak populer.

Pada kesempatan ini saya mengharapkan adanya pemahaman warga yang bermukim di bantaran dan badan sungai untuk secara sadar dan sukarela untuk pindah demi kepentingan yang lebih besar. Selain itu Pemerintah juga menghimbau kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran tidak membuang sampah di saluran drainase dan sungai serta meningkatkan gotong – royong untuk membersihkan saluran drainase dilingkungan masing-masing.

Saudara Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan yang terhormat, hadirin yang berbahagia,

Berkenaan dengan Pandangan Umum Fraksi Dewan yang Terhormat disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

Mengenai tanggapan terkait kondisi makro ekonomi yang dikatakan belum mencapai target dapat dijelaskan bahwa target tersebut merupakan target yang terdapat dalam RPJMD tahun 2013-2018 sebelum perubahan. Adapun target pada RPJMD Perubahan tahun 2013-2018 antara lain:

- Pertumbuhan Ekonomi : $0,5 \pm 1$
- Tingkat Kemiskinan : 6,00
- Tingkat Pengangguran : 7,00

Berdasarkan target tersebut, capaian indikator makro pembangunan dimaksud telah melampaui target yang telah ditentukan. Namun demikian Pemerintah menghargai saran dan masukan Fraksi Dewan yang Terhormat berkenaan dengan masih perlunya meningkatkan pencapaian laju pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka.

Pemerintah memberikan apresiasi terhadap saran yang disampaikan oleh Fraksi Dewan yang Terhormat untuk terus berupaya membangun kemandirian fiskal melalui terobosan peningkatan pendapatan asli daerah terutama melalui penerimaan pajak dan retribusi daerah.

Terkait dengan Pandangan Fraksi Dewan yang Terhormat terhadap pencapaian sasaran pembangunan, disampaikan hal sebagai berikut :

Berkaitan dengan pencapaian sasaran pembangunan kualitas sumber daya manusia, Pemerintah terus berkomitmen dengan tetap memprioritaskan peningkatan kualitas siswa/mahasiswa di Provinsi Kalimantan Timur serta meningkatkan kapasitas tenaga pendidik/guru di masa mendatang. Selanjutnya untuk

kesejahteraan tenaga pendidik dan kependidikan, Pemerintah telah memberikan Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP) kepada tenaga pendidik dan kependidikan, disamping itu juga pemberian beasiswa telah dilakukan kepada siswa/mahasiswa dan tenaga pendidik dan kependidikan.

Berkenaan dengan pelatihan kewirausahaan, Pemerintah terus melakukan peningkatan pencapaian pada program melalui pendidikan dan keterampilan serta mengoptimalkan Balai Latihan Kerja (BLK). Sementara itu, kendala yang dihadapi untuk kewirausahaan adalah keterbatasan akses permodalan, serta distribusi dan pemasaran produk hasil wirausaha yang belum optimal.

Selanjutnya tentang sasaran penguatan cadangan pangan terutama dalam upaya pemenuhan beras di Kalimantan Timur, dapat dijelaskan langkah-langkah sebagai berikut:

- a.) Meningkatkan produktivitas padi melalui pemberian bantuan sarana produksi berupa benih, pupuk dan pestisida serta mekanisasi alat pertanian.
- b.) Dalam rangka mengembalikan fungsi lahan pertanian, Pemerintah akan selalu melakukan koordinasi dengan Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya, kemudian Provinsi akan memfasilitasi Kabupaten/Kota dalam penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).
- c.) Untuk mengatasi kekurangan tenaga penyuluh telah dilakukan melalui pelatihan berbasis penyuluhan kepada Penyuluh Swadaya, mengangkat Tenaga Harian Lepas - Tenaga Bantu (THL-TB).

Sehubungan dengan permintaan Fraksi Dewan yang Terhormat, yaitu peningkatan jalan dan jembatan yang mengalami kerusakan serta penanganan longsor, dapat dijelaskan bahwa hal ini telah menjadi prioritas pembangunan sebagaimana tertuang pada RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023 melalui program pembangunan jalan dan jembatan serta program rehabilitasi / pemeliharaan infrastruktur pekerjaan umum.

Berkenaan dengan capaian proyek dengan pola *Multiyears Contract* seperti Jembatan Mahakam IV, Pipa Transmisi Air Baku Sekerat dan SPAM Maloy, dapat dijelaskan hingga Desember 2018 sebagai berikut :

- **Pembangunan Jembatan Mahakam IV**

Pembangunan Jembatan Mahakam IV samarinda, untuk jalan pendekat baik sisi samarinda maupun sisi samarinda seberang secara kontrak telah selesai. Sedangkan untuk bentang tengah juga telah selesai dengan diberikan perpanjangan waktu sampai akhir bulan Maret 2019 dan pihak penyedia jasa dikenakan denda. Akibat adanya kebutuhan teknis yang mengakibatkan terjadinya pekerjaan tambah/kurang pada bentang tengah jembatan, terdapat kekurangan dana yang saat ini telah dialokasikan pada APBD Tahun 2019, yaitu untuk pekerjaan pengaspalan, railing jembatan, lantai jalan pendekat antara pilar P10 dan pilar P11, dan uji laik fungsi jembatan. Ditargetkan jembatan dapat dioperasikan pada Desember 2019.

- **Pembangunan SPAM**

Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) Maloy pada Desember 2018 realisasi fisik mencapai 98,07% dan pihak penyedia jasa diberikan perpanjangan waktu sampai dengan 15 Februari 2019 dengan progress 100%, pihak penyedia jasa dikenakan denda.

- **Pembangunan Pipa Transmisi Sekerat**

Pembangunan Pipa Transmisi Sistem Sekerat pada Desember 2018 realisasi fisik mencapai 97,79% dan pihak penyedia jasa diberikan perpanjangan waktu sampai dengan 19 Februari 2019 dengan progress 100%, pihak penyedia jasa dikenakan denda.

Untuk memfungsikan Pipa Transmisi dan SPAM Maloy, terkendala dengan pembebasan lahan Intake Sekerat, dimana dari 8 (delapan) orang pemilik lahan, hanya 5 (lima) orang yang sepakat dengan harga tanah, sementara 3 (tiga) orang masih dalam tahap negosiasi, diharapkan pada tahun ini telah dapat difungsikan.

Pemerintah sependapat dengan Fraksi Dewan yang Terhormat. Dapat disampaikan bahwa Pemerintah telah menyusun dokumen adaptasi dan mitigasi bencana alam khususnya bencana banjir.

Selanjutnya untuk misi keempat, Pemerintah akan terus berupaya untuk mempertahankan serta meningkatkan capaian pembangunan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan dan berorientasi pada pelayanan publik.

Berkaitan dengan tutupan lahan pertambangan dan perkebunan, Pemerintah akan selalu mengevaluasi keberadaan usaha pertambangan dan perkebunan yang bermasalah, hal ini diperkuat dengan Peraturan Gubernur Nomor 01 Tahun 2018 tentang Penataan Pemberian Izin dan Non Perizinan serta Tata Kelola Perizinan di Sektor Pertambangan, Kehutanan dan Perkebunan Kelapa Sawit di Kalimantan Timur.

Saudara Ketua dan anggota Dewan yang Terhormat, hadirin yang berbahagia, berikut saya sampaikan Jawaban dan Penjelasan atas Pandangan Umum Fraksi Partai Hanura

Berkenaan dengan tanggapan dan saran Fraksi Dewan yang Terhormat disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Pemerintah mengucapkan terima kasih atas apresiasi yang diberikan oleh Fraksi Dewan yang Terhormat terkait dengan penyampaian LKPJ tahun 2018.
2. Terkait peningkatan kemandirian fiskal mohon melihat jawaban Pemerintah pada Fraksi Partai Keadilan Sejahtera.
3. Berkenaan dengan sumber daya alam Kalimantan Timur yang memberikan dampak bagi kesejahteraan rakyat akan tetap menjadi perhatian visi Kalimantan Timur 2019-2023 sesuai dengan misi keempat yaitu Berdaulat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam yang berkelanjutan.
4. Berkenaan dengan penanggulangan kemiskinan, Pemerintah akan selalu memprioritaskan melalui program penanggulangan kemiskinan bidang kesejahteraan sosial dan program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial.
5. Atas pernyataan Fraksi Dewan yang Terhormat atas langkah-langkah apa yang akan dan telah ditempuh dalam upaya pemenuhan beras di Kalimantan Timur mohon melihat jawaban Pemerintah pada Fraksi Partai Keadilan Sejahtera.

6. Berkenaan dengan pelaksanaan proyek pembangunan dengan pola *Multi Years Contract*, mohon melihat jawaban Pemerintah pada Fraksi Partai Keadilan Sejahtera.
7. Terhadap permintaan Fraksi Dewan yang Terhormat untuk memprioritaskan pembangunan infrastruktur jalan dapat dijelaskan bahwa program pembangunan infrastruktur jalan menjadi prioritas sebagaimana tertuang pada Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 – 2023 melalui program pembangunan jalan dan jembatan serta program rehabilitasi/pemeliharaan infrastruktur jalan umum. Terkait kondisi jalan provinsi tahun 2018 sepanjang 895,09 km, berdasarkan data hasil inspeksi jalan tahun 2018 yang dilaksanakan oleh Dinas PUPR & PERA dapat di informasikan bahwa kondisi jalan mantap provinsi mencapai 52,85% (473,09 km) dengan kondisi baik 52,52% (470,13 km), kondisi sedang 0,33% (2,96 km), kondisi rusak ringan 32,82% (293,76 km) dan rusak berat 14,33% (128,24 km).

Penanganan jalan dari Kutai Barat – Mahakam Hulu dapat dijelaskan bahwa sejak tahun 2016 telah dilakukan pembangunan jalan tersebut melalui sharing pendanaan APBN, APBD Provinsi Kalimantan Timur dan APBD Kabupaten Mahakam Ulu. Sebagai upaya untuk memastikan penyelesaian pembangunan jalan tersebut, saat ini Pemerintah Pusat melalui Kementerian PUPERA bersama Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu sedang menyiapkan kesepakatan kerjasama pembangunan jalan batas Kubar ke Ibukota Kabupaten Mahakam Ulu untuk bersama - sama membiayai pembangunan jalan Tering - Ujoh Bilang dengan target 140 Km secara bertahap, dan diharapkan pada tahun 2024 dapat diselesaikan pembangunannya.

8. Pemerintah sependapat dengan Fraksi Dewan yang Terhormat bahwa penyaluran dan alokasi bantuan keuangan difokuskan pada program prioritas Kabupaten/Kota sesuai usulan Pemerintah Kabupaten/Kota dan mendukung program prioritas Provinsi.
9. Terhadap saran dan pendapat Fraksi Dewan yang Terhormat untuk penanganan banjir, mohon melihat jawaban Pemerintah pada Fraksi Partai Keadilan Sejahtera.

Saudara Ketua dan anggota Dewan yang Terhormat, hadirin yang berbahagia, selanjutnya saya sampaikan Jawaban dan Penjelasan atas Pandangan Umum Fraksi Partai Golongan Karya

Sehubungan dengan tanggapan dan perhatian Fraksi Dewan yang Terhormat menyikapi kondisi ekonomi makro Kalimantan Timur serta indikator pembangunan RPJMD 2013-2018, disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Berkenaan dengan peningkatan kontribusi sektor pertanian arti luas terhadap PDRB, Pemerintah sependapat dengan Fraksi Dewan yang Terhormat.
2. Pemerintah sepakat untuk melakukan hilirisasi terhadap sumber daya alam Kalimantan Timur dengan mendorong peningkatan investasi di daerah.
3. Pemerintah sependapat dengan Fraksi Dewan yang Terhormat dalam rangka memicu pertumbuhan PDRB dan penyerapan tenaga kerja daerah secara signifikan.
4. Pembangunan jalan tol dan Jembatan Mahakam IV dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Pembangunan Jalan Tol Samarinda – Balikpapan

Pembangunan Jalan Tol Balikpapan – Samarinda untuk Seksi I yang dibiayai oleh APBD Provinsi dengan pola kontrak tahun jamak, secara kontraktual telah selesai 100%. Namun demikian akibat adanya addendum kontrak yang disebabkan pekerjaan tambah/kurang menyesuaikan dengan kebutuhan teknis di lapangan, terdapat pekerjaan yang belum diselesaikan. Saat ini penuntasannya dilanjutkan oleh Kementerian PUPR melalui sumber dana investasi PT. Jasamarga Balikpapan Samarinda (PT. JBS). Sedangkan Pembangunan Jalan Tol Balikpapan – Samarinda untuk Seksi II, III, dan IV yang ditangani oleh Investor yaitu PT. JBS dan untuk Seksi V yang ditangani melalui dana APBN+Loan, saat ini masih dikerjakan. Pemerintah menargetkan Jalan Tol Balikpapan – Samarinda akan beroperasi pada akhir tahun 2019.

b. Pembangunan Jembatan Mahakam IV, mohon melihat jawaban Pemerintah pada Fraksi Partai Keadilan Sejahtera.

5. Berkenaan dengan rencana akses alternatif menuju bandara APT. Pranoto, dapat dijelaskan bahwa untuk program jangka menengah, Pemerintah akan membangun jalan alternatif Simpang 3 Batu Cermin – Batu Besaung – Bandara APT. Pranoto yang saat ini dalam tahap pengadaan lahan. Sedangkan untuk jangka pendek, Pemerintah telah mengusulkan pada APBN tahun 2020 untuk melakukan pelebaran jalan Simpang 3 Lempake – Simpang 3 Sambera. Selain itu pada APBN Tahun 2019, telah dialokasikan anggaran sebesar Rp.15 milyar untuk peninggian badan jalan DI. Pandjaitan.

6. Pemerintah sependapat untuk melakukan harmonisasi RTRW antar tingkat Pemerintah guna menyinkronkan pembangunan antar Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.
7. Dalam rangka reformasi birokrasi untuk mendukung program nasional dan daerah guna menciptakan iklim investasi yang lebih baik, Pemerintah mengapresiasi saran Fraksi Dewan yang Terhormat.

Terkait dengan tanggapan mengenai penyelenggaraan dekosentrasi dan tugas pembantuan, dapat disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Sehubungan dengan saran Fraksi Dewan yang Terhormat agar Pemerintah terus melakukan komunikasi yang intensif dengan Pemerintah Pusat terkait dengan alokasi anggaran dari APBN, Pemerintah telah melakukan upaya-upaya melalui Forkominda, Musrenbang, Koordinasi secara langsung antar SKPD teknis dengan Kementerian Terkait dan Rapat-rapat Koordinasi yang diselenggarakan oleh Instansi Vertikal. Oleh karenanya mohon dukungan Anggota DPRD Provinsi dengan Anggota DPR RI dan DPD untuk memperjuangkan kemajuan pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur ini melalui jalur parlemen.
2. Berkaitan dengan penyerapan anggaran yang berasal dari APBN dapat disampaikan bahwa tahun 2018 penyerapan mencapai 89,04%, meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2017 yang mencapai 86,31% dan tahun 2016 yang mencapai 84,13%.
3. Untuk mengurangi terjadi ketidaksesuaian program antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Pemerintah telah berupaya memberikan penjelasan yang sangat detail terkait usulan

program daerah baik melalui kegiatan Rapat Koordinasi Teknis Rencana Pembangunan Pusat dan Daerah yang diinisiasi oleh Kementerian Dalam Negeri hingga pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional.

Berkenaan dengan penyelenggaraan tugas umum Pemerintah yang meliputi kerjasama antar daerah, instansi vertikal maupun pihak ketiga, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pemerintah sependapat dengan Fraksi Dewan yang Terhormat untuk percepatan penyelesaian permasalahan tapal batas administrasi wilayah antar Kabupaten/Kota dan batas wilayah Kalimantan Timur.
2. Berkenaan dengan pengawasan terhadap wilayah perbatasan Kaltim dengan negara tetangga dan Provinsi lain, akan menjadi perhatian Pemerintah.
3. Berkaitan dengan rencana pengelolaan bandara APT. Pranoto bekerjasama dengan PT. Angkasa Pura, Pemerintah sependapat dengan Fraksi Dewan yang Terhormat, namun demikian perlu terlebih dahulu dilakukan kajian mendalam sehingga didapatkan manfaat yang optimal bagi Pemerintah dan masyarakat Kalimantan Timur. Saat ini Bandara APT. Pranoto pengelolaannya dilakukan Unit Pengelola Bandar Udara (UPBU) Kementerian Perhubungan.
4. Atas pernyataan Fraksi Dewan yang Terhormat untuk membuat rencana secara komprehensif kawasan ekonomi khusus maloy, Pemerintah telah menetapkan PT. MBTK sebagai badan pengelola kawasan yang melakukan realisasi rencana pembangunan dan pengelolaan secara KEK MBTK.

5. Sehubungan dengan masukkan agar Pemerintah menginventarisir aset-aset yang dimiliki oleh Provinsi dengan melakukan pengamanan baik secara administratif (dokumen kepemilikan) maupun secara fisik di lapangan agar permasalahan yang ada dapat diminimalisir, hal ini sejalan dengan niat dan upaya yang telah dilakukan Pemerintah selama ini. Pemerintah setiap lima tahun sekali melakukan survei barang langsung ke lokasi Barang Milik Daerah (BMD) tersebut dioperasionalkan dan selain itu telah diupayakan pensertifikasian aset-aset berupa tanah yang belum bersertifikat. Selain upaya tersebut, sebagai bentuk cek silang dengan belanja Pemerintah, maka dilakukan rekonsiliasi Belanja Modal dengan Penambahan BMD di tahun pelaporan. Dalam hal pencatatan, dengan menggunakan Aplikasi BMD menuntut pengelolaan barang tertib administrasi, hal ini dikarenakan dokumen-dokumen tersebutlah yang menjadi sumber inputan di aplikasi.

Terkait tanggapan Fraksi Dewan yang Terhormat terhadap LKPJ tahun 2018, disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Pendapatan

Atas apresiasi Fraksi Dewan yang Terhormat terhadap peningkatan realisasi pendapatan daerah mohon melihat jawaban Pemerintah pada Fraksi Partai Keadilan Sejahtera.

2. Belanja Daerah

Terkait dengan belanja daerah dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut :

a. Terkait kesejahteraan tenaga pendidik dan kependidikan, serta beasiswa bagi guru yang melanjutkan pendidikan mohon melihat jawaban Pemerintah pada Fraksi Partai Keadilan Sejahtera.

- b. Terkait Anggaran Kesehatan yang belum terserap sebesar Rp.137,961 Miliar dapat disampaikan bahwa hal ini dikarenakan adanya efisiensi dari pengadaan maupun kegiatan program kesehatan, namun jika dilihat dari capaian fisik semua kegiatan telah terlaksana dengan baik. Selanjutnya kendala dalam pembangunan kesehatan di Kalimantan Timur diantaranya adalah sulitnya merubah perilaku masyarakat, oleh karenanya Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) harus dioptimalkan.
- c. Berkenaan dengan Pembangunan Jalan Tol pada seksi I yang dibiayai oleh sumber pendanaan APBD Provinsi dengan pola tahun jamak tahun 2015 – 2018 dapat dijelaskan secara kontraktual telah diselesaikan namun secara program belum terselesaikan akibat adanya pekerjaan tambah/kurang menyesuaikan dengan kebutuhan teknis dilapangan. Pekerjaan yang belum dapat diselesaikan adalah sebagai berikut :
- Segmen I telah selesai pembangunannya
 - Segmen II, terdapat pekerjaan yang belum dapat dituntaskan yaitu pekerjaan pagar ROW 3.545 meter, Guardrill 4.309 meter dan Badan Jalan pada STA 8+050 – 8+300 (250 meter).
 - Segmen III, terdapat pekerjaan yang belum dapat dituntaskan yaitu pekerjaan pagar ROW 3.794 meter, marka jalan 5.900 meter, Guardrill 4.440 meter, Sideditch 4.500 meter, oprit overpass 3 titik, 3 titik rambu pengaturan dan peringatan guide pos type A/B dan badan jalan STA 9+450 – 9+750 (300 meter)

- Segmen IV, terdapat pekerjaan yang belum dapat dituntaskan yaitu pekerjaan pagar ROW 900 meter dan blok beton pelindung lereng
- Segmen V, terdapat pekerjaan yang belum dapat dituntaskan yaitu pekerjaan pada STA 20+950 – 22+250 (1.075 meter), pagar ROW 3.275 meter, rambu pengaturan dan peringatan, guide post type A/B dan pekerjaan perkerasan (Aggregat, Aspal, Barrier dan Guardrail) pada STA 18+750 – 20+950 (2.200 meter).

Sebagai konsekuensinya, Gubernur Kalimantan Timur melalui surat kepada Menteri PUPR Nomor 135.7/59/BM-DPUPRPERA/2017 tanggal 12 Juli 2017 dan Nomor 620/3815/B.ISD-3 tanggal 9 Agustus 2018 meminta kepada Kementerian PUPR untuk penyelesaian pekerjaan yang belum tertangani.

Untuk penyelesaian jalan tol Balikpapan – Samarinda termasuk Seksi I, ditargetkan selesai pada Desember 2019. Saat ini sebagian pekerjaan pada Seksi I yang belum tertangani telah dikerjakan melalui sumber pendanaan investor yaitu PT. Jasa Marga Balikpapan – Samarinda.

Untuk Pembangunan Jembatan Mahakam IV, mohon melihat jawaban Pemerintah pada Fraksi Partai Keadilan Sejahtera.

- d. Berkenaan dengan upaya melengkapi fasilitas bandara APT. Pranoto, Pemerintah telah mengusulkan kepada kementerian perhubungan untuk pemasangan *airfield lighting system* (ALS) melalui sumber dana APBN Tahun 2020. Selain itu dengan memperhatikan meningkatnya jumlah penerbangan, juga diusulkan untuk Pengembangan

Apron dan Taxi Way. Berdasarkan penjelasan Direktur Jendral Perhubungan Udara pada saat melakukan inspeksi angkutan lebaran di bandara APT. Pranoto, Kementerian Perhubungan berkomitmen untuk merealisasikan fasilitas tersebut diatas.

- e. Berkaitan dengan rendahnya serapan anggaran urusan Kehutanan, dapat disampaikan bahwa 93% Belanja Langsung berasal dari Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH DR) dan adanya keterlambatan peraturan-peraturan/ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang perubahan penggunaan DBH SDA DR sehingga baru bisa dilaksanakan bulan Oktober 2018.

Selanjutnya untuk pelaksanaan pengelolaan DAS di Kalimantan Timur akan menjadi perhatian Pemerintah, selain itu dapat kami informasikan bahwa evaluasi terhadap Rancangan Pengelolaan DAS secara terpadu telah disusun oleh Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) Mahakam Berau, UPT Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Berkenaan dengan penyampaian pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, Pemerintah akan selalu mempedomani regulasi yang berlaku.

Saudara Ketua dan anggota Dewan yang terhormat, hadirin yang berbahagia, selanjutnya saya sampaikan Jawaban dan Penjelasan atas Pandangan Umum Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa

Terkait dengan pandangan umum Fraksi Dewan Yang Terhormat, disampaikan sebagai berikut :

Pertama, terhadap saran dan pendapat Fraksi Dewan yang Terhormat agar Pemerintah melaksanakan koordinasi dengan seluruh *stakeholder* dalam upaya penanganan banjir khususnya di Kota Samarinda, dapat dijelaskan bahwa Pemerintah telah melaksanakan rapat koordinasi pada tanggal 17 Juni 2019. Begitu pula untuk penanganan banjir di Kota Balikpapan dan Bontang juga telah dilaksanakan koordinasi melalui penyusunan MoU dan perjanjian kerjasama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota Balikpapan dan Bontang. Untuk penjelasan lebih detail, mohon melihat jawaban Pemerintah pada Fraksi Partai Keadilan Sejahtera.

Kedua, Berkaitan dengan penanggulangan lubang-lubang eks tambang, Pemerintah akan selalu serius dalam penanganannya dan upaya yang telah dilakukan dengan mengingatkan kepada pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) setiap bulan untuk pengamanan lubang tambang, serta menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Sedangkan untuk jaminan reklamasi (Jamrek), Pemerintah telah melakukan pengawasan dan pemeriksaan pembayaran secara transparan berdasarkan Surat Edaran Dirjen Minerba Kementerian ESDM Nomor 05/E/36.04/DJB/2013 tentang Pengawasan dan pemeriksaan pemasaran dan keuangan terhadap pemegang IUP.

Untuk evaluasi pelaksanaan reklamasi, maka setiap pemegang IUP wajib memiliki rencana reklamasi yang kemudian dilaporkan setiap tahun oleh pemegang IUP dan dilakukan penilaian oleh inspektur tambang.

Berkenaan dengan tanggapan Fraksi Dewan Yang Terhormat mengenai indikator dan target yang ada dalam dokumen RPJMD Kaltim 2013-2018, disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Pemerintah berkomitmen dan serius dalam melaksanakan program pembangunan khususnya yang telah tertuang dalam dokumen RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018.
2. Berkaitan dengan indikator dan target pembangunan kesejahteraan dan pemerataan pendapatan masyarakat, dapat disampaikan bahwa indikator dan target tersebut merupakan akumulasi dari beberapa program prioritas yang harus dilaksanakan oleh SKPD pengampu dalam rangka mencapai indikator dan target pembangunan kesejahteraan tersebut.
3. Dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi hijau yang tidak tergantung migas, Pemerintah selalu mensinergikan program antara pusat dan daerah.
4. Berkenaan dengan capaian indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan infrastruktur, dapat dijelaskan bahwa penetapannya berdasarkan batasan kriteria yaitu Ketersediaan Fisik (Availability), Kualitas Fisik (Quality), Kesesuaian (Appropriateness), Pemanfaatannya (Utility), dan Penyerapan Tenaga Kerja (Job Creation), serta menghitung kontribusi sektor infrastuktur terhadap perekonomian. Terkait dengan responden serta pengolahan data menggunakan data primer (data survey) melalui wawancara dan data sekunder (instansi terkait). Untuk validasi responden ditetapkan dengan kriteria yaitu masyarakat yang mendapatkan output atau manfaat (outcome) dari pembangunan tersebut serta pelaku-pelaku usaha serta profesi dibidang infrastruktur.

Dalam proses pengukuran indeks, diasistensikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) terkait metodologi serta jumlah sample serta metode – metode analisis dalam penentuan metode sampling. Namun demikian, Pemerintah sependapat dengan Fraksi Dewan yang Terhormat bahwa untuk mengukur kinerja infrastruktur selain IKLI juga menggunakan indikator kinerja lainnya terutama indikator outcome.

Sebagai contoh pada pembangunan prasarana jalan, Pemerintah menggunakan indikator jalan mantap, pengendalian banjir menggunakan indikator luas genangan, pembangunan jaringan irigasi menggunakan indikator lahan beririgasi teknis, penyediaan air bersih menggunakan indikator kapasitas air minum dan cakupan layanan, keselamatan lalu lintas jalan menggunakan indikator jumlah kecelakaan lalu lintas dan angka fatalitas.

5. Berkenaan dengan dugaan adanya pejabat publik yang merangkap jabatan, Pemerintah akan melakukan evaluasi.
6. Pemerintah sepakat dengan Fraksi Dewan yang Terhormat untuk melihat semua aspek pencapaian kualitas lingkungan hidup.

Mengenai perencanaan Pemerintah yang tidak sejalan dengan pendapatan dapat disampaikan bahwa pada penyusunan perencanaan, pendapatan baru sebatas estimasi. Mengenai LKPJ tahun 2018 telah disusun berdasarkan ketentuan yang berlaku, adapun capaian-capaian dari beberapa indikator telah melalui tahap verifikasi kepada SKPD terkait.

Saudara Ketua dan anggota Dewan yang Terhormat, hadirin yang berbahagia,

Selanjutnya saya sampaikan Jawaban dan Penjelasan atas Pandangan Umum Fraksi Partai Gerindra

Berkenaan dengan tanggapan Fraksi Dewan yang Terhormat, dapat dijelaskan sebagai berikut :

Berkenaan dengan mewujudkan visi dan misi, yang tertuang didalam RPJMD 2013-2018, kami selalu optimis untuk mencapainya. Hal ini didasarkan atas hasil evaluasi yang menunjukkan hampir semua target di sektor ekonomi seperti pertumbuhan yang meningkat, penerimaan daerah yang meningkat dan beberapa keberhasilan yang telah dicapai lainnya.

Pemerintah mengapresiasi kepada Fraksi Dewan yang Terhormat dalam mengawal kinerja Pemerintah untuk menuju kondisi rakyat Kalimantan Timur menjadi semakin baik dan berkualitas.

Berkenaan dengan koreksi dan rekomendasi yang dilakukan oleh BPK-RI, Pemerintah menyampaikan apresiasi terhadap Fraksi Dewan yang Terhormat untuk mengawal dan menindaklanjuti kinerja Pemerintah.

Saudara Ketua dan anggota Dewan yang terhormat, hadirin yang berbahagia,

Selanjutnya saya sampaikan Jawaban dan Penjelasan atas Pandangan Umum Fraksi Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan

Pemerintah siap untuk mengantisipasi tantangan fenomena alam supaya tidak terjadi kondisi lingkungan yang memprihatinkan maupun kerugian dan penderitaan rakyat.

Terkait dengan pernyataan Fraksi Dewan yang Terhormat bahwa pertumbuhan ekonomi Kaltim lebih disebabkan permintaan dan penawaran pasar, khususnya komoditi dari sumber daya alam, untuk itu dapat disampaikan bahwa Pemerintah terus melakukan terobosan dalam rangka peningkatan nilai tambah bahan mentah menjadi bahan baku industri.

Berkenaan dengan tanggapan Fraksi Dewan yang Terhormat mengenai tingkat kemiskinan mohon melihat jawaban Pemerintah pada Fraksi Partai Hanura.

Berkaitan dengan peningkatan PDRB, Pemerintah telah melakukan terobosan dan inovasi melalui kebijakan :

1. Melakukan upaya hilirisasi industri secara optimal, dengan meningkatkan nilai tambah pada sumber daya alam yang terbarukan untuk menjadi bahan baku industri.
2. Menjamin stabilitas politik dan menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk mendorong peningkatan investasi.
3. Pengembangan Kawasan Industri (KI) pada kawasan peruntukan industri pada kawasan yang telah ditetapkan.

Sehubungan dengan tanggapan mengenai pengelolaan keuangan daerah, dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Pendapatan

Berkenaan dengan peningkatan PAD, Pemerintah akan terus berupaya untuk meningkatkannya, hal ini tercermin dalam perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mulai tahun :

- Tahun 2016 sebesar Rp. 3,42 trilyun
- Tahun 2017 sebesar Rp. 4,58 trilyun
- Tahun 2018 sebesar Rp. 5,79 trilyun

2. Belanja Daerah

Terkait dengan realisasi belanja modal yang lebih kecil dibandingkan dengan belanja lainnya dapat disampaikan bahwa Belanja Modal marginnya lebih kecil dari pada Belanja Barang dan Belanja Hibah karena di dalam komponen belanja lainnya termasuk Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah yang ditransfer ke Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur, dan merupakan kewajiban Undang-Undang sebesar 70% dari Pendapatan yang diterima.

Berkenaan dengan tanggapan Fraksi Dewan yang Terhormat mengenai capaian sasaran pembangunan dan kendala yang dihadapi disampaikan hal-hal sebagai berikut :

Pemerintah sependapat dengan Fraksi Dewan yang Terhormat agar peningkatan SDM dilakukan secara berkelanjutan. Sedangkan untuk meningkatkan kompetensi dan kapabilitas di Provinsi Kalimantan Timur, telah dilakukan melalui SKPD terkait.

Berkenaan dengan inovasi dan terobosan untuk mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas serta peningkatan di sektor pertanian mohon melihat jawaban Pemerintah pada Fraksi Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan.

Pemerintah sependapat dengan Fraksi Dewan yang Terhormat, bahwa perlu dilakukan percepatan pembangunan jalan dari Kota Sangatta ke Kecamatan Busang Kabupaten Kutai Timur dan Kutai Barat ke Kabupaten Mahakam Ulu pada Ruas Jalan Tering - Ujoh Bilang. Percepatan pembangunan pada ruas jalan tersebut dapat dilakukan melalui pola kerjasama antar Pemerintah yang

disesuaikan dengan kewenangan. Hal ini telah diterapkan Pemerintah pada pembangunan jalan Tering - Ujoh Bilang. Untuk penjelasan detailnya berkenaan dengan pembangunan jalan Tering - Ujoh Bilang, mohon dapat melihat jawaban Pemerintah pada Fraksi Partai Hanura.

Pemerintah sependapat dengan Fraksi Dewan yang Terhormat tentang membudayakan Pendidikan anti KKN yang dimulai sejak usia dini.

Sehubungan dengan saran Fraksi Dewan yang Terhormat, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Berkaitan dengan pandangan Fraksi Dewan yang Terhormat tentang persiapan ibukota negara, Pemerintah telah dan terus mempersiapkan segala keperluan yang terkait persiapan khususnya Sumber Daya Manusia, ekonomi, infrastruktur termasuk teknologi.
- 2) Terkait upaya penanganan banjir di Kota Samarinda, mohon melihat jawaban Pemerintah pada Fraksi Partai Keadilan Sejahtera.
- 3) Pemerintah akan melakukan evaluasi secara berkala terhadap Perusda yang tidak berdampak terhadap peningkatan pendapatan daerah.

***Saudara Ketua dan anggota Dewan yang terhormat, hadirin yang berbahagia,
Selanjutnya saya sampaikan Jawaban dan Penjelasan atas Pandangan Umum Fraksi Partai Demokrat***

Terima kasih atas apresiasi yang diberikan Fraksi Dewan yang Terhormat terhadap perolehan opini WTP untuk keenam kalinya.

Berkenaan dengan pencegahan bertambahnya jumlah korban lubang tambang, mohon melihat jawaban Pemerintah pada Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa.

Terhadap saran Fraksi Dewan yang Terhormat yaitu upaya-upaya yang harus dilakukan Pemerintah untuk mengurangi kejadian bencana banjir, Pemerintah sependapat dan menjadi perhatian Pemerintah dalam pengambilan kebijakan pembangunan dan pemberian izin usaha.

Untuk penjelasan detail terutama penanganan banjir Kota Samarinda, mohon melihat jawaban Pemerintah pada Fraksi Partai Keadilan Sejahtera.

Terkait harapan Anggota Fraksi Dewan Yang Terhormat mengenai upaya nyata terhadap pengelolaan DAS dapat dijelaskan sebagai berikut :

Berkaitan dengan tutupan lahan kritis di wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS), mohon melihat jawaban Pemerintah pada Fraksi Partai Golongan Karya.

Atas dorongan Fraksi Dewan yang Terhormat terkait dengan sosialisasi dan pelatihan tanggap bencana, serta optimalisasi jalur koordinasi terhadap penanggulangan bencana, Pemerintah telah melakukan :

- Sosialisasi Pengurangan Risiko Bencana dan Penyusunan Rencana Strategis untuk penanggulangan bencana banjir;
- Sosialisasi evakuasi mandiri dalam mengantisipasi kejadian bencana;
- Pelatihan Tim Reaksi Cepat (TRC) untuk penanggulangan dan evakuasi bencana.

Mengenai saran Fraksi Dewan Yang Terhormat agar melakukan pengujian secara langsung terkait hasil-hasil pembangunan yang disajikan dalam dokumen LKPJ akan menjadi perhatian Pemerintah, perlu diketahui bahwa hasil-hasil pelaksanaan pembangunan telah melalui mekanisme monitoring dan evaluasi baik realisasi anggaran maupun hasil pelaksanaan dilapangan. Untuk evaluasi realisasi anggaran telah dilakukan Pemerintah Provinsi melalui Tim Evaluasi Penyerapan Realisasi Anggaran (TEPRA) yang terdiri dari Bappeda Provinsi Kalimantan Timur, Inspektorat, BPKAD dan Biro Administrasi Pembangunan. Selain itu untuk monitoring lapangan telah dilakukan secara terpadu oleh tim tersebut dan dievaluasi langsung oleh Gubernur kepada Kepala SKPD melalui Rapat Pimpinan.

Terhadap pertanyaan Fraksi Dewan yang Terhormat berkenaan dengan proyek pembangunan jalan tol Balikpapan – Samarinda dan Jembatan Mahakam IV, mohon melihat jawaban Pemerintah pada Fraksi Partai Keadilan Sejahtera dan Fraksi Partai Golongan Karya.

Terhadap hubungan korelasi antara pencapaian pengurangan kemiskinan dengan jumlah rumah tangga sejahtera mohon melihat jawaban Pemerintah pada Fraksi Partai Hanura.

Berkenaan dengan sektor pariwisata untuk meningkatkan PAD, Pemerintah telah mengembangkan destinasi wisata yang memiliki daya saing seperti : Derawan, Maratua, Biduk-Biduk dan beberapa destinasi lainnya. Langkah-langkah yang dilakukan melalui pembangunan sarana dan prasarana wisata; Penguatan SDM

(Homestay, Kelompok Sadar Wisata); Promosi Digital ; penguatan kuliner dan gelaran event melalui pembinaan ekonomi masyarakat yang secara langsung bersinggungan dengan lokasi destinasi. Hal ini ditunjang dengan fasilitas bandara Kalimantan Berau dan bandara Maratua yang sudah beroperasi dan terkoneksi dengan bandara lainnya yang ada di Kalimantan Timur.

Untuk mengantisipasi akibat perang dagang antara Amerika dan Tiongkok, Pemerintah dalam menjaga pertumbuhan kinerja ekonomi melakukan beberapa upaya:

- a. Meningkatkan kinerja ekspor untuk sektor non migas non batubara
- b. Perluasan pasar ekspor ke negara-negara non tradisional (Afrika, Amerika Selatan, Amerika Latin, Asia Selatan, Timur Tengah, Eropa Timur)
- c. Percepatan optimalisasi *direct call* melalui pelabuhan Kariangau Balikpapan karena *multiplier* efek nya sangat besar untuk pertumbuhan ekonomi Kaltim;
- d. Fasilitasi akses pasar ekspor bagi eksportir dan calon eksportir;
- e. Pengembangan ekonomi kreatif unggulan kaltim (sektor kriya, sektor fashion dan sektor kuliner) melalui pendampingan dan fasilitasi akses pasar. Karena dengan menggerakkan ekonomi kreatif berarti ada peningkatan penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pendapatan pelaku usaha UKM.

Berkenaan dengan menurunnya pendapatan melalui retribusi jasa umum dan retribusi perizinan tertentu akan menjadi perhatian Pemerintah.

Sehubungan dengan pandangan Fraksi Dewan yang Terhormat tentang rencana dan tindakan nyata dari Pemerintah untuk meningkatkan kinerja Perusda/ BUMD, Pemerintah telah melakukan evaluasi secara berkala terhadap kinerja Perusda/ BUMD, memberikan tambahan modal kerja bagi Perusda/ BUMD yang memberikan kontribusi positif bagi perkembangan perekonomian di Kalimantan Timur.

Berkenaan dengan saran perbaikan penyajian dan substansi LKPJ seperti Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Timur melakukan presentasi penyampaian dokumen LKPJ, SKPD menyampaikan historis komponen pendapatan daerah akan menjadi perhatian Pemerintah.

Terhadap permintaan Anggota Fraksi Dewan yang Terhormat untuk Badan Pendapatan Daerah dan Perangkat Daerah untuk mempresentasikan mengenai historis seluruh komponen pendapatan dan strategi pemerintah daerah dalam menggali pendapatan kedepan akan menjadi pertimbangan Pemerintah.

Terhadap permintaan Fraksi Dewan yang Terhormat untuk mengundang BPK Provinsi Kalimantan Timur untuk mendiskusikan hasil kinerja keuangan dan hasil audit khusus, akan menjadi perhatian.

Berkenaan dengan saran Fraksi Dewan yang Terhormat terkait penugasan Komisi Gabungan atau Fraksi dalam rangka melakukan pengawasan pelaksanaan rekomendasi DPRD yang ada akan menjadi perhatian Pemerintah.

Saudara Ketua dan anggota Dewan yang terhormat, hadirin yang berbahagia, selanjutnya saya sampaikan Jawaban dan Penjelasan atas Pandangan Umum Fraksi Partai Persatuan Pembangunan – Partai Nasional Demokrat

Berkenaan dengan solusi efektif dalam mengatasi masalah banjir, maka Pemerintah mengambil langkah :

1. Terkait penanganan permasalahan banjir di Kota Samarinda, Pemerintah sependapat dengan langkah – langkah yang disarankan Fraksi Dewan yang Terhormat. Pemerintah akan melaksanakan langkah – langkah tersebut sesuai kewenangan yang dimiliki.
2. Pemerintah telah membatasi pembukaan lahan melalui pencabutan ijin-ijin tambang yang bermasalah atau belum *clear and clean (CNC)*.
3. Saat ini Pemerintah sedang menyusun dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) yang masih dalam pembahasan pansus.
4. Untuk evaluasi pelaksanaan reklamasi dan jaminan reklamasi, mohon melihat jawaban Pemerintah pada Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa.
5. Untuk mitigasi bencana mohon melihat jawaban Pemerintah pada Fraksi Keadilan Sejahtera.

Pemerintah mengucapkan terima kasih atas apresiasi Fraksi Dewan yang Terhormat dalam menanggapi capaian indikator makro pembangunan Kalimantan Timur.

Sehubungan dengan tanggapan mengenai pengelolaan keuangan daerah, dapat disampaikan sebagai berikut :

Terkait dengan pelaksanaan pengelolaan anggaran yang telah mendapatkan opini WTP, tetapi masih menyisakan beberapa poin catatan, akan ditindaklanjuti dalam penyelesaiannya.

1. Pendapatan

Berkenaan dengan tidak tercapainya target anggaran pendapatan asli daerah, di antaranya dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Target penjualan aset daerah Rp.1,9 Miliar hanya terealisasi Rp.750 juta, tidak tercapai disebabkan gagalnya pelaksanaan Lelang Kendaraan Roda 2 dan 4 dari beberapa SKPD Provinsi Kaltim.
- b. Target penerimaan Jasa Giro Rp.3,5 Miliar, hanya terealisasi Rp.1,9 Miliar, tidak tercapainya target ini karena sebagian besar dana dalam Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ditempatkan dalam bentuk Deposito.
- c. Target Tuntutan ganti kerugian daerah Rp.65 juta tidak dapat terealisasi, karena tidak ada keputusan Majelis Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi pada Tahun 2018 tentang kerugian uang daerah.

2. Belanja Daerah

Berkaitan dengan perbedaan nilai belanja di dalam penyampaian laporan LKPJ dengan Raperda pelaksanaan APBD yang diaudit BPK, hal ini disebabkan perbedaan laporan hasil audit BPK-RI menggunakan format Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, sedangkan laporan pertanggungjawaban pemerintah menggunakan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Didalam format Peraturan Pemerintah Nomor 71, nilai belanja terbagi menjadi 2 (dua) yaitu Belanja

dan Transfer Dana, sedangkan pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 nilai Belanja adalah penjumlahan dari Belanja dan Transfer Dana senilai Rp.9,345 Triliun.

Berkenaan dengan tanggapan Fraksi Dewan yang Terhormat mengenai beberapa poin temuan BPK pada prinsipnya penjelasan atas permasalahan tersebut tercantum di dalam laporan hasil pemeriksaan BPK Buku Dua tentang penilaian terhadap pelaksanaan pengendalian interen dan buku tiga tentang ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengenai rekomendasi dan perbaikan yang harus dilakukan oleh Pemerintah telah dibuatkan rencana aksi dengan jadwal pelaksanaan yang telah ditetapkan dan disepakati oleh Badan Pemeriksa.

Saudara Ketua dan anggota Dewan yang terhormat, hadirin yang berbahagia, selanjutnya saya sampaikan Jawaban dan Penjelasan atas Pandangan Umum Fraksi Partai Amanat Nasional

Berkenaan dengan visi Kaltim Maju 2018 mohon melihat jawaban Pemerintah pada Fraksi Gerindra.

Pemerintah menyampaikan apresiasi kepada Fraksi Dewan yang Terhormat untuk mengawal kinerja Pemerintah, agar kondisi rakyat Kalimantan Timur menjadi semakin baik dan berkualitas.

Terhadap pandangan Fraksi Dewan yang Terhormat berkaitan dengan hasil koreksi dan rekomendasi BPK-RI mohon melihat jawaban Pemerintah pada Fraksi Partai Gerindra.

Pemerintah berterima kasih dan sangat mengapresiasi tindakan Fraksi Dewan yang Terhormat dalam mengawal poin-poin penting rekomendasi BPK-RI, dapat disampaikan bahwa Pemerintah telah menindaklanjuti rekomendasi tersebut melalui SKPD terkait sampai dengan akhir tahun 2019.

Saudara Ketua, wakil ketua dan anggota Dewan yang terhormat, hadirin yang berbahagia,

Demikian jawaban dan penjelasan Pemerintah atas Pandangan umum Anggota Dewan yang disampaikan melalui fraksi-fraksi DPRD Provinsi Kalimantan Timur, dengan harapan dapat lebih melengkapi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kalimantan Timur tahun 2018.

Mohon maaf bilamana dalam penyampaian jawaban dan penjelasan ini, masih terdapat pertanyaan yang belum dijawab oleh Pemerintah, hal ini tentu bukanlah suatu kesengajaan dan akan kami lengkapi kemudian.

Selanjutnya, ijin saya menyampaikan terima kasih kepada Saudara Ketua, Wakil Ketua dan seluruh Anggota Dewan yang terhormat serta para hadirin semua, atas segala perhatian dan kesabarannya dalam mengikuti penyampaian jawaban dan penjelasan Pemerintah atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi Dewan ini.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan Rahmat, Taufik dan Hidayah-Nya bagi kita semua, Terima kasih.

Wabillahi Taufik Wal Hidayah

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakkatuh,

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

Dr. Ir. H, ISRAN NOOR, M.Si